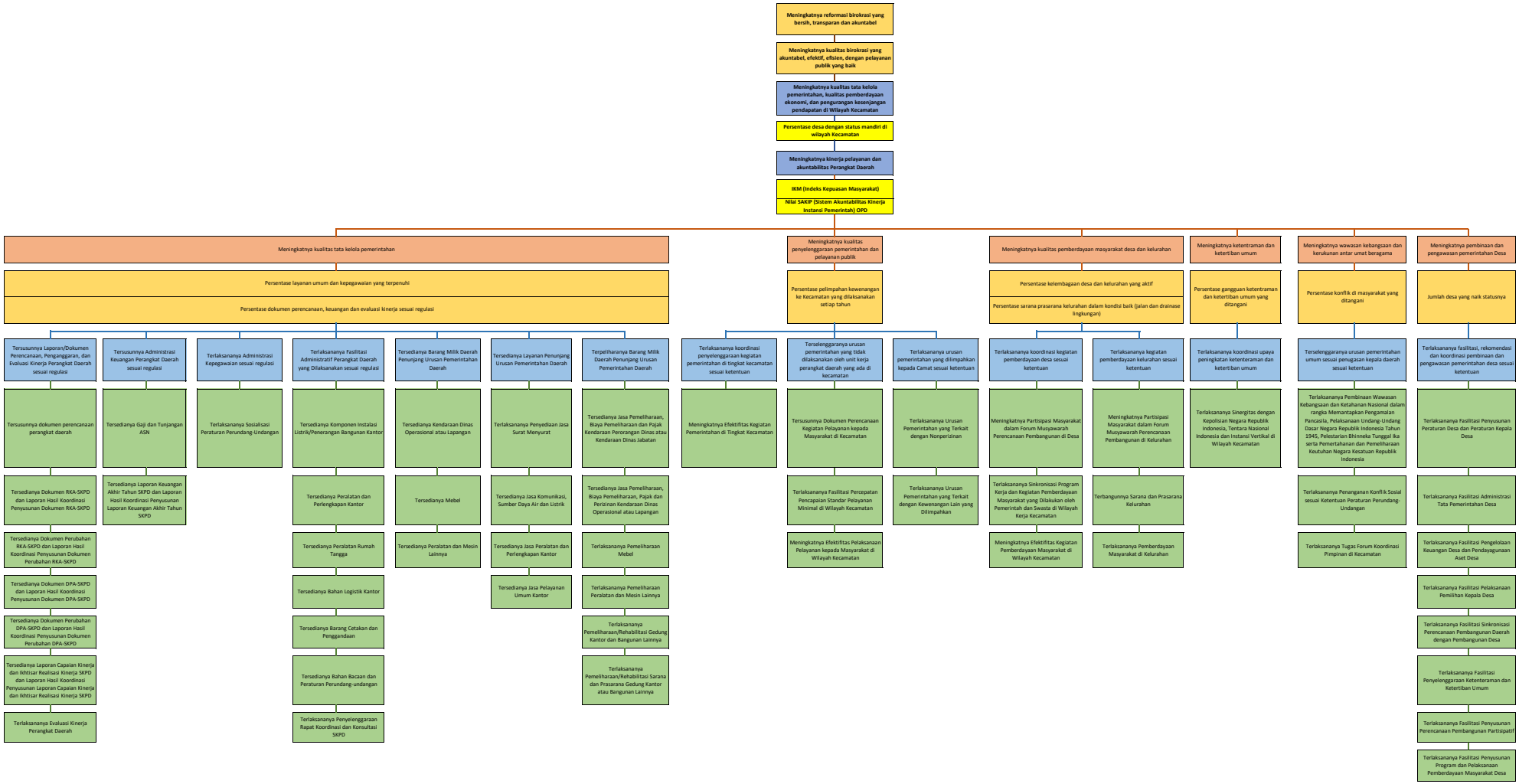
Meningkatnya reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel
Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan di Wilayah Kecamatan
Persentase desa dengan status mandiri di wilayah Kecamatan
Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi
Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi
Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi
Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi
Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Tersedianya Mebel
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun
Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai ketentuan
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai ketentuan
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif
Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)
Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa sesuai ketentuan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan sesuai ketentuan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani
Terlaksananya koordinasi upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama
Persentase konflik di masyarakat yang ditangani
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah sesuai ketentuan
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa
Jumlah desa yang naik statusnya
Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sesuai ketentuan
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa